



Retribusi Sampah di Depo Gunakan QRIS

DLH Kota Jogja Mulai Bahas Sistem Pembayaran

JOGJA - Pasca memperpanjang masa uji coba penerapan retribusi sampah di depo, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja mulai berencana membahas sistem pembayaran untuk kebijakan tersebut.

Ada kemungkinan, retribusi sampah di depo bakal menggunakan sistem pembayaran digital. Misalnya seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Ahmad Haryoko mengatakan, sebelum retribusi sampah di depo diterapkan, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu. Melalui konsultasi dengan pihak terkait dan melihat respon masyarakat.

Mekanisme penerapan retribusi berbayar di depo nantinya kemungkinan juga tidak menggunakan sistem pembayaran tunai. Pembayaran digital bakal diterapkan untuk mengantisipasi tindakan seperti pungutan liar. Tidak mungkin menerapkan pembayaran di depo, risikan untuk nantinya terjadinya sesuatu," ujar Haryoko, kemarin (6/11).

Menurutnya, adanya penerapan retribusi sampah di depo itu tidak lain untuk mengedukasi masyarakat supaya mau mengelola sampah yang dihasilkan. Sederhananya, masyarakat mengolah sampahnya sendiri agar jumlah yang dibuang ke depo lebih sedikit.

Haryoko menilai, semakin banyak



ELANG KHARISMA DEWANGGARADAR JOGJA

SEMBARANGAN: Warga melempar kantong berisi sampah di depo pembuangan sampah Mandala Krida, Jogja, kemarin (6/11).

sampah yang dibuang ke depo juga akan berdampak pada semakin besar nominal yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, ketika diterapkan harapannya masyarakat semaksimal mungkin membuang sampah ke depo.

Selama masa uji coba berlangsung DLH Kota Jogja juga belum membebaskan biaya retribusi. Namun baru sekadar melakukan penimbangan untuk melihat besaran sampah yang dibuang masyarakat. "Jadi kalau sampah yang dibuang sedikit pasti nanti keluar biaya sedikit. Sementara untuk rencana tarif masih dalam pembahasan," ungkap Haryoko.

Penjabat Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto mengakui, kebijakan retribusi sampah pada depo dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. Namun kondisi darurat sampah memang harus diselesaikan dengan berbagai kebijakan.

Sehingga dia berharap, agar semua

pihak bisa memahami kondisi dalam menghadapi situasi darurat sampah di Kota Jogja. Termasuk jika harus menerapkan kebijakan retribusi sampah berbayar di depo.

Dia pun ingin, penerapan retribusi di depo dapat meminimalisasi pembuangan sampah. Kemudian biaya retribusi yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah



nantinya dapat dialokasikan untuk pengelolaan sampah. "Kontribusi yang ada akan kami kembalikan untuk kepentingan pengelolaan sampah," kata Sugeng.

Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro berharap, penerapan retribusi pembuangan sampah pada depo dikaji ulang oleh pemkot. Sebab, kebijakan itu nantinya akan sangat membebani masyarakat. "Di kondisi sekarang saya rasa kurang tepat, apalagi masyarakat juga sudah banyak membayar pajak," sebut Kuncoro. **(inu/din/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005